

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penebar Swadaya Group, Jakarta, 2012.
- Achmad Chulaemi, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-Macam Hak Atas Tanah Dan Pemindahannya*, FH UNDIP, Semarang, 1986.
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria; Pertanahan Indonesia*, Jilid 1, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2003.
- A.P Parlindungan, *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Alumni, Bandung, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Serba-Serbi Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, 1984.
- B.F Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2005.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cet. Ke-11, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Darwin Ginting, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Peradilan Adat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013.
- Eddy Ruchiyat, *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Armico, Bandung, 1984.
- Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, Lembaga Penerbitan Universitas Khairun, Ternate, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-5, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008.

- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2008.
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.
- R. Atang Ranoemihardja, *Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Ramli Zein, *Hak Pengelolaan dalam Undang-Undang Pokok Agraria*, Rineka Cipta, 1995.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998.
- Sholih Mu'adi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Cara Litigasi dan Non Litigasi*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Soeprapto, *Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktek*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Sumarto, *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win Win Solution*, Badan Pertanahan Nasional RI Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI, Jakarta, 2012.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Cet. Ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2010.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 (empat)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

## **C. Sumber Lainnya**

### **1. Wawancara**

Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Agung Adi Nurcahyo, di Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya.

Wawancara dengan Ketua Badan Pengawas KPPKW, Harisnadi Achmad Mustofa, di Kantor KPPKW.

Wawancara dengan Kepala Desa Cisempur, Maman Suparman, Di Kantor Desa Cisempur.

## **2. Internet**

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional,  
*Penanganan Kasus Pertanahan*,  
<http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan>.